

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya wewenang Parlemen Eropa (PE) pasca Perjanjian Lisboa, PE kini mulai menunjukkan eksistensinya dalam panggung politik internasional. Hal ini tidak lain yakni hadir dalam meningkatkan perannya terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) melalui wewenang legislasi, anggaran, dan pengawasan (Attinà & Lodge, n.d.; Raube, 2012). Sebagai lembaga legislatif yang secara unik mementaskan kontestasi demokrasi lintas batas, lintas bangsa, dan lintas budaya, PE memiliki keistimewaan tersendiri melalui kontestasi ideologi dan identitas politik dalam setiap aktivitasnya. Secara resmi rangkaian agenda PE dilaksanakan oleh kelompok politik berideologi yang mewakili identitas politiknya masing-masing, oleh karena itu pertarungan ideologi dan identitas dalam PE kemudian menjadi diskursus menarik dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat UE. Dengan memilih spektrum politik yang mendominasi PE saat ini yakni aliran sentrisme dan isu *inter-regional* yang cukup krusial yakni Eropa dan Indo-Pasifik, melalui penelitian ini peneliti akan menganalisis secara empiris pengaruh ideologi dan identitas kelompok politik sentris dan implikasinya terhadap kebijakan UE di Indo-Pasifik sebagai studi kasus.

Ideologi dan identitas politik telah menjadi faktor penting dalam proses integrasi Eropa. Lebih dari tiga dekade lalu tembok rezim komunisme mulai runtuh di Eropa. Peristiwa ini kemudian menyulut gelombang optimisme politik yang menyapu Eropa dengan harapan mengonstitusi masyarakat yang lebih bebas, membentuk skema pasar yang terbuka, hingga Eropa yang lebih bersatu (Wike et al., 2019). Namun seiring dengan berkembangnya UE sebagai sebuah kekuatan normatif, spektrum politik masyarakat Eropa juga turut berkembang. Selama beberapa tahun terakhir, ideologi politik yang sebelumnya terpinggirkan layaknya partai beraliran *far-right* dan *far-left* mulai memenangkan pemilihan umum (pemilu) di seluruh Eropa.

Fenomena ini kemudian menjadi hal yang tidak asing untuk terjadi terkhususnya karena adanya pergeseran gagasan tentang isu keamanan, migrasi, maupun ekonomi (Hikmawan, 2017). Peristiwa ini menyimpulkan bahwa telah adanya pergeseran ideologis yang lebih luas dalam politik Eropa. Ideologi ekstrem saat ini mulai memunculkan kepopulerannya, terutama ideologi dengan posisi di ujung paling kanan dan kiri spektrum politik.

Polarisasi yang terjadi di masyarakat Eropa ini kemudian berubah menjadi polarisasi elektoral, termasuk polarisasi *voter turn-out* di pemilu PE atau Pemilu Eropa. Melalui fenomena polarisasi elektoral yang terjadi PE, maka perdebatan yang terjadi dalam aktivitas PE mencerminkan polarisasi masyarakat Eropa. Hal ini sama halnya dalam dinamika politik domestik di mana parlemen merepresentasikan pola identitas dan nilai yang ada di masyarakat. Di Prancis, partai *National Rally* sayap kanan, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, secara tak terduga mengambil 25% suara dalam pemilihan PE di tahun 2014. Bahkan di dalam PE saat ini, kelompok populis membentuk hampir sepertiga dari anggota parlemen, lebih dari dua kali lipat pangsa kursi mereka dalam satu dekade (Bélanger & Wunsch, 2022).

Pentingnya ideologi dan identitas di PE kemudian terbukti ketika Pemilu Eropa merupakan ‘pemilu pilihan’ bagi para *ideologues* (Fenzl et al., 2022) yakni penganut ideologi, terutama yang tidak kenal kompromi dan dogmatis. Hal ini terlihat dari tren partisipasi Pemilu Eropa tahun 2019 di mana terjadi polarisasi publik yang secara signifikan menggambarkan *ideologues* yang termobilisasi melalui Pemilu Eropa. Hal ini kemudian menjelaskan mengapa PE menjadi lebih terpolarisasi, bahkan tanpa adanya perubahan signifikan dalam sikap keseluruhan di antara publik Eropa, dan mengapa partai-partai ekstrem lebih berhasil di PE. Tentunya polarisasi yang cukup signifikan ini memunculkan pertanyaan apakah kebangkitan ideologi ekstrem di PE mengancam proses integrasi Eropa maupun pengembangan kerja sama UE. Kemudian seberapa besar peran identitas dan politik di PE dalam memengaruhi kebijakan UE.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut maka penting untuk secara seksama memahami bagaimana ideologi politik bekerja oleh kelompok-kelompok di dalam PE. Salah satunya memahami proses afiliasi politik seorang anggota perwakilan

dari mulai partai dalam Pemilu hingga afiliasi kelompok politik di parlemen. Dalam PE, anggota perwakilan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Eropa kemudian disebut sebagai *Members of European Parliament* (MEPs). MEPs yang dipilih oleh masyarakat Eropa ini sebelumnya tergabung ke dalam partai nasional sesuai dengan kepercayaan politiknya masing-masing.

Selama proses Pemilu Eropa, MEPs akan berkampanye dengan partai politik Eropa atau yang populer disebut *Europarty* (Clasen, 2020). Meskipun dalam proses kampanye MEPs akan berafiliasi dengan *Europarty*¹, namun kelak setelah terpilih semua aktivitas politik MEPs dilakukan melalui afiliasi masing-masing partai ke dalam sebuah kelompok politik (European Parliament, 2022). Kelompok-kelompok politik ini merupakan 'organisasi payung' bagi berbagai *Europarty*. MEPs sepenuhnya bebas untuk memilih kelompok yang ingin mereka ikuti. Dalam beberapa kasus, kelompok politik juga merupakan koalisi politik dari sejumlah partai Eropa, partai nasional, dan politisi independen. Kelompok Politik secara wajib memiliki tugas untuk harus selalu berkomitmen dalam menghormati promosi nilai-nilai Dewan Eropa, terutama pluralisme politik, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Komposisi PE ke-9 saat ini memiliki total 7 kelompok politik, yakni *European People's Party (EPP/Christian Democrats)*, *Progressive Alliance of Socialist and Democrats (S&D)*, *Renew Europe*, *The Greens/Europe Free Alliance (Greens/EFA)*, *Identity and Democracy Group (ID)*, *European Conservatives and Reformists (ECR)*, dan *The Left* yang terdiri atas 705 anggota MEPs. Komposisi 705 anggota ini merupakan keadaan PE setelah Inggris keluar dari UE pada Januari 2020. Sebelumnya, PE memiliki kapasitas maksimal sesuai dengan perjanjian UE yakni 751 kursi MEPs. Setelah terjadi peristiwa *Brexit*², 73 kursi yang sebelumnya dimiliki oleh MEPs Inggris, 27 kursi telah didistribusikan kembali pada negara

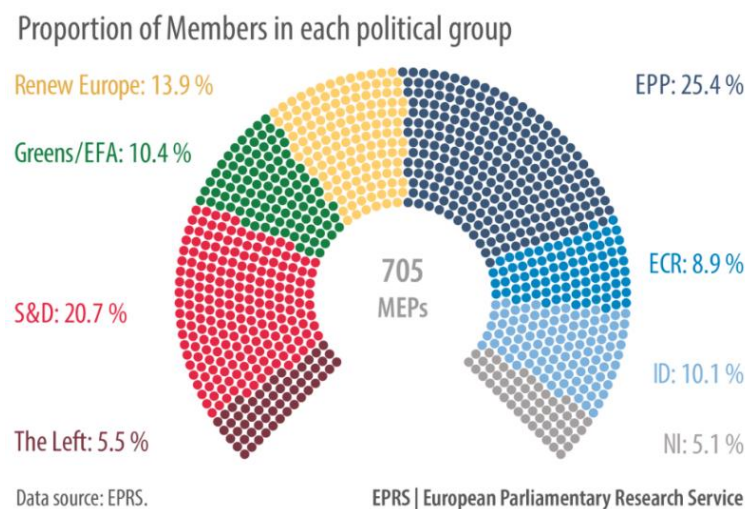
¹ *Europarty* atau *European political party*, yang secara formal dikenal sebagai partai politik di tingkat Eropa adalah jenis organisasi partai politik yang beroperasi secara transnasional di Eropa dan di dalam lembaga-lembaga UE. Lihat Clasen, P. (2020). Does the Europarty Still not Matter? European Elections 2019 and the Party of European Socialists. In *Die Europawahl 2019* (pp. 39-51). Springer VS, Wiesbaden.

² *Brexit* adalah singkatan dari dua kata bahasa Inggris: 'Britain' dan 'exit' dan mengacu pada proses penarikan Inggris Raya (UK) dari Uni Eropa (UE). Lihat Wallenfeldt, J. (2022, September 15). Brexit. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Brexit>

anggota lain, sedangkan 46 kursi lainnya telah disimpan untuk kemungkinan pembesaran jumlah MEPs di masa yang akan datang.

Peristiwa *Brexit* ini kemudian juga mengubah komposisi kelompok politik di PE. Hal ini merupakan akibat dari re-distribusi kursi yang kemudian masuk ke dalam kelompok politik yang berbeda-beda. Komposisi kelompok politik di PE pada masa periode 2019-2024 tergambar melalui gambar 1 yang di mana masing-masing kelompok politik diwakili oleh warna sesuai dengan spektrum politiknya. Warna biru secara keseluruhan mewakili kelompok sayap kanan, warna merah mewakili kelompok sayap kiri, warna kuning mewakili kelompok sentris *third way*, warna hijau untuk kelompok *Greens*, dan abu-abu untuk MEPs yang tidak tergabung ke dalam kelompok politik apa pun.

Gambar 1 Komposisi Kursi di Parlemen Eropa Berdasarkan Kelompok Politik

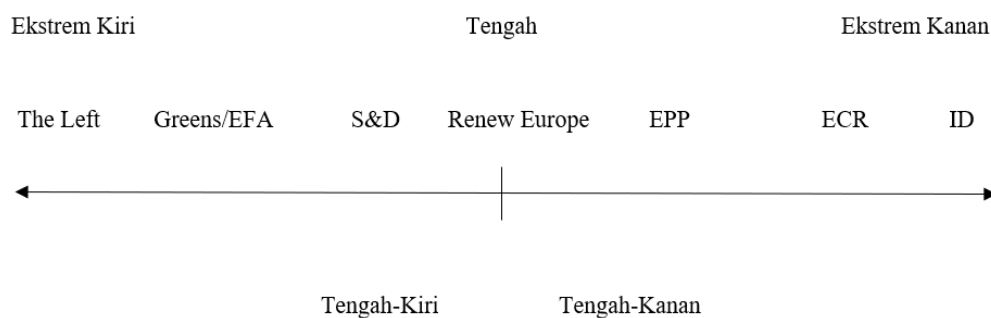


Sumber: *European Parliamentary Research Service, 2022*

Gambar 1 menunjukkan komposisi kursi MEPs yang dimiliki masing-masing kelompok politik setelah fenomena *Brexit*. Dalam komposisi PE saat ini terdapat 179 anggota yang tergabung dalam EPP, 146 dalam S&D, 98 dalam *Renew Europe*, 73 dalam *Greens/EFA*, 70 dalam ID, 63 dalam ECR, 39 dalam *The Left*, dan 37 anggota *Non-Incrites/Non-Attached* yang tidak tergabung dalam kelompok mana pun. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa saat ini spektrum politik dalam PE terlihat adanya polarisasi yang cukup signifikan.

Fenomena 7 kelompok politik saat ini menunjukkan kepopuleran kelompok politik kanan jauh/*far-right* yang memainkan peran kelompok politik euroskeptis seperti *Identity and Democracy* dan *European Conservatives and Reformist*. Dalam sumbu spektrum beraliran kiri jauh/*far-left*, *The Left* kalah saing dengan kelompok terbesar kedua *Socialist & Democrats*. Meskipun begitu kelompok politik dengan identitas sentrisme, yakni EPP, S&D, dan *Renew Europe* tetap menjadi tiga kekuatan terbesar di PE.

Gambar 2 Spektrum Kelompok Politik di Parlemen Eropa



Sumber: Diolah secara pribadi oleh peneliti dari berbagai sumber

Memahami perilaku legislator di PE tentunya menjadi hal yang penting bagi untuk bisa menentukan sejauh mana preferensi MEPs memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini termasuk memahami dimensi politik dari tiap-tiap kelompok politik. Melalui gambar 2 terlihat bahwa ideologi politik yang terkontestasi melalui kelompok politik di PE merupakan dimensi politik kanan-kiri klasik (Hix et al., 2006; Kantola et al., 2022). Selain itu, beberapa studi sebelumnya juga melihat adanya bentuk lain dari dimensi politik di PE, yakni kelompok politik yang pro-UE dan anti-UE (Kantola et al., 2022; Otjes & van der Veer, 2016) maupun dimensi kelompok *Greens, Alternatives, Libertarians (GAL)* melawan *Traditionalist, Authoritarians, Nationalists (TAN)* (Ahrens, Gaweda, et al., 2022; Brack, 2017; Kantola et al., 2022).

Meskipun begitu kompetisi antar *left-right political cleavage* masih menjadi dimensi yang paling jelas dalam memahami pertarungan antar kelompok politik di PE (Mcelroy & Benoit, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya telah juga

ditemukan bahwa dimensi kanan-kiri tradisional masih membentuk ruang politik di PE. Begitu juga dengan kepentingan nasional (Börzel & Hartlapp, 2022). Diskursus dimensi politik kiri-kanan ini kemudian menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kohesi suara antar ideologi politik dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa penelitian kemudian menyatakan bahwa (Cavallaro et al., 2018; Chiru & Stoian, 2019; Hooghe et al., 2002) dimensi kiri-kanan di PE menunjukkan kohesi suara yang kompak, terutama pada masalah kebijakan ekonomi dan pasar, maupun kebijakan industri dan tenaga kerja.

Dari rasionalisasi tersebut, maka dapat ditarik kemudian bahwa kontestasi ideologi klasik kanan-kiri menjadi indikator utama untuk dapat memahami pertarungan antar kelompok politik dalam memiliki pengaruh. Lebih jauh, kohesi antar kelompok politik di PE juga menjadi diskursus yang penting untuk menentukan sejauh mana kelompok politik dan MEPs dapat memengaruhi keputusan akhir dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan menganalisis kohesi dalam pengambilan suara antara MEP dan kelompok politik. Kohesi ini akan dilihat dari pidato MEPs dalam agenda tertentu dan kecocokannya dengan manifesto kelompok politiknya masing-masing.

Dalam proses *plenary debate*³ atau sidang pleno, MEPs akan meninjau laporan dan proposal untuk keputusan yang disiapkan oleh komite. Lalu MEPs diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan secara lisan yang kemudian diikuti dengan pemungutan suara. Sidang pleno (Servent, 2017) ini nantinya akan memberikan suara pada proposal legislatif baru. Masing-masing MEPs yang tergabung ke dalam kelompok politiknya, memiliki waktu untuk memberikan pidato dan pertanyaan, kemudian pendapat dari pidato ini akan disesuaikan kecocokannya dengan manifesto prioritas politik yang ada. Kohesi pengambilan suara dan pendapat MEP dalam proses debat maupun kesesuaian dengan visi ideologi manifesto kelompok politik tentunya akan menentukan sejauh mana ideologi politik memengaruhi proses pengambilan kebijakan di *level* UE.

³ Parlemen Eropa bertemu sebulan sekali untuk sesi pleno di Strasbourg, Prancis. Sidang berlangsung empat hari dari Senin sampai Kamis. Perwakilan dari semua negara anggota mengambil bagian dalam sidang pleno untuk memberikan suara pada keputusan. Lihat Servent, A. R. (2017). *The European Parliament*. Bloomsbury Publishing.

Sebagai lembaga legislatif yang secara langsung dipilih oleh masyarakat Eropa, maka PE secara tidak langsung mewakilkan pola dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat Eropa. Kelompok politik yang sejatinya merupakan ‘fraksi’ atau bentuk koalisi dari *europarty*, partai nasional, maupun anggota independen menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat Eropa di tingkat UE. Lebih jauh PE juga menjadi salah satu *platform* resmi sebagai lembaga tempat pertukaran antar pembuat kebijakan. PE secara normatif menjadi jembatan penghubung antara pemegang kepentingan dan masyarakat Eropa. PE juga berperan sebagai wadah pendapat bagi masyarakat sipil dan komunitas epistemik seperti lembaga kajian atau *think-tank* maupun akademisi (European Parliament, 2022). Oleh karena itu masyarakat dengan haluan dan poros politiknya akan menyelaraskan pilihan dengan ideologi politik partai nasional maupun *europarty* masing-masing. Sehingga sejatinya prioritas politik yang diusung oleh suatu kelompok politik harus berdasar dan mengacu pada aspirasi masyarakat Eropa melalui wewenang parlemen.

Setiap kelompok politik yang ada pada dasarnya memiliki haknya masing-masing dalam menentukan prioritas kebijakan yang mereka usung untuk mengatur agenda UE melalui wewenang parlemen. Prioritas politik masing-masing kelompok memperlihatkan preferensi sesuai dengan ideologi dan identitas yang mereka miliki. Pertarungan atas ideologi politik dan identitas di PE kemudian menjadi hal yang penting dipertimbangkan mengingat PE saat ini memiliki peran yang signifikan dalam proses formulasi kebijakan di level UE.

Pasca Perjanjian Lisboa, peran PE secara cermat berevolusi memunculkan otoritas, pengaruh, dan dampak yang secara lebih umum lagi di panggung dunia (Sugiono, 2020). McElroy dan Benoit (2010) menemukan bahwa PE merupakan pusat daripada kontestasi politik UE. Lebih jauh, PE juga disebut sebagai perpanjangan pertarungan politik domestik negara-negara anggota UE. Tak terkecuali peran kontestasi PE untuk turut serta memberikan kontribusinya dalam membentuk objektif kebijakan luar negeri UE.

Secara normatif saat ini UE memiliki kerangka kebijakan luar negeri bersama yang disebut *European Union’s Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang dibentuk tahun 1993. Saat ini PE memiliki wewenang untuk berkontribusi pada

perkembangan CFSP dan khususnya mendukung skema *European External Action Service* (EEAS), *European Union Special Representatives* (EUSRs) dan delegasi sebagai dimensi politik luar negeri UE. Wewenang atas anggaran yang dimiliki PE menjadi salah satu pengaruh besar yang membentuk skala dan ruang kebijakan luar negeri UE. Lebih jauh, PE juga memiliki keharusan untuk melaksanakan debat dua kali setahun tentang laporan kemajuan hubungan luar negeri untuk mengajukan pertanyaan dan rekomendasi kepada dewan dan perwakilan tinggi UE. Rekomendasi, konsultasi, dan pengawasan inilah merupakan wewenang dimiliki PE yang secara tidak langsung memberikan sumbangsih besar terhadap kebijakan luar negeri UE secara keseluruhan (European Parliament, 2022).

Ditinjau secara yuridis, perwakilan tinggi UE diharuskan untuk berkonsultasi secara rutin dengan PE untuk membahas aspek-aspek CFSP. Lebih jauh, konsultasi ini juga dilakukan untuk melapor perkembangan CFSP kepada parlemen. Keharusan konsultasi ini terdapat pada Pasal 36 Perjanjian Uni Eropa tahun 1993. PE juga memiliki keharusan untuk mengajukan pertanyaan dan rekomendasi kepada dewan dan perwakilan tinggi UE. Rekomendasi, konsultasi, dan pengawasan merupakan wewenang yang dimiliki PE dan secara tidak langsung memberikan sumbangsih besar terhadap kebijakan luar negeri UE secara keseluruhan. Dalam proses inilah kontestasi ideologi dan identitas politik masing-masing MEPs bermain. Setiap kelompok politik pasti memiliki pandangannya tersendiri dalam mengaktualisasi wewenang atas anggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap pengembangan kebijakan UE.

Sebelumnya telah terjadi beberapa kasus yang telah mewarnai hubungan luar negeri UE akibat pengaruh PE. Pada tahun 2017, PE sempat mengeluarkan resolusi sawit berjudul *Palm Oil and Deforestation of the Rainforests* yang merugikan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar (Konečná, 2017). Akibatnya, hubungan UE-Indonesia sempat mengalami ketegangan dalam sengketa sawit. Resolusi sawit ini spesifik diusung oleh salah satu MEP yang berasal dari kelompok politik kiri jauh atau *The Left*. *The Left* sendiri merupakan kelompok politik *far-left* yang memiliki visi bahwa kebijakan utama UE saat ini masih tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mereka melihat bahwa kebijakan UE terlalu sering

didasarkan pada logika persaingan yang berorientasi pasar secara radikal (The Left, 2022). Tentunya kelompok politik *The Left* ini memiliki pandangan yang cukup ekstrem dalam memandang isu lingkungan, oleh karena itu tidak diherankan mengapa mereka menolak penggunaan sawit di Eropa. Dari kasus ini dapat disimpulkan secara sementara bahwa ideologi suatu kelompok politik dapat secara signifikan berpengaruh terhadap hubungan eksternal UE. Sehingga dapat dimungkinkan bahwa ideologi dan identitas politik berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan di PE.

Meskipun kursi PE saat ini diwakilkan oleh posisi yang cukup besar bagi MEPs berideologi ekstrem terutama posisi *far-right* dan *far-left* dalam spektrum politik, salah satu aliran politik yang tidak kalah penting adalah aliran sentrisme. Menjelang Pemilu Eropa di tahun 2019, partai-partai sentris mulai menunjukkan kepopulerannya untuk melawan partai-partai nativis-iliberal (Youngs & Mortera-Martinez, 2019). Hal ini menimbulkan banyak perbincangan tentang pembaharuan sentrisme dalam politik Eropa dan memberikan dorongan yang sehat bagi reformasi UE. Mereka yang melabeli diri mereka sebagai sentris sering kali disebut sebagai sebagai benteng pro-Eropa yang progresif melawan populis-nativisme.

Kelompok tengah atau yang lebih populer disebut *centrist* ini memiliki kecenderungan dalam menerima kesetaraan dan keseimbangan antar dua sumbu. Poros ideologi politik di PE saat ini sebagian besar didominasi oleh aliran sentrisme (European Parliament, 2019) yang diwakilkan oleh tiga kelompok politik terbesar yakni EPP yang beraliran *centre-right*, S&D yang beraliran *centre-left*, dan *Renew Europe* yang beraliran *third way centrist*. Saat ini EPP sendiri menguasai 25,4% persen kursi, sedangkan S&D 20,7% dan *Renew Europe* 13,9%. Jika diakumulasikan kelompok politik dengan label moderat ini sudah menguasai 60% dari hasil voting. Tentunya secara tidak langsung *policy output* maupun kesepakatan atas konsensus di PE dapat dipastikan secara sementara dipengaruhi oleh politik sentris.

Menurut (Woshinsky, 2008), Sentrisme adalah pandangan atau posisi politik yang melibatkan penerimaan dan/atau dukungan keseimbangan kesetaraan sosial dan tingkat hierarki sosial, sementara menentang perubahan politik yang akan

mengakibatkan pergeseran masyarakat yang signifikan baik ke kiri atau ke kanan. Politik kiri-tengah atau *centre-left* maupun kanan-tengah atau *centre-right* juga jatuh ke dalam klasifikasi kompas politik sentrisme yang dikombinasikan dengan preferensi kecondongan ke sisi spektrum politik kiri-kanan masing-masing. Contoh dari kelompok dengan preferensi kecondongan ini dapat dilihat melalui kelompok EPP dan S&D di PE. Di tengah pertarungan klasik sumbu kanan-kiri, aliran politik sentris kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena mereka melabeli diri mereka sebagai sebuah *middle ground*. Selain itu muncul kembali politik sentris *third way*. Politik sentris *third way* pada dasarnya ingin mendamaikan politik sayap kanan dan kiri dengan mengadvokasi sintesis antara platform ekonomi *centre-right* dan kebijakan sosial *centre-left* (Goes, 2018). Saat ini *Renew Europe* di PE menempati posisi *third way centrism*.

Istilah sendiri "sentrisme" mengacu pada lokasi sudut pandang pada spektrum politik, yang mengidentifikasi lima jenis sikap politik. Radikal politik dan liberal berada di ujung kiri spektrum, sementara konservatif dan reaksioner berada di ujung kanan. Kaum radikal dan reaksioner, meskipun memiliki pandangan politik yang berbeda, cenderung menganjurkan perubahan yang ekstrim. Kaum sentris termasuk dalam kategori moderat dalam spektrum, dan sering kali tidak secara ketat mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum konservatif atau liberal (Jablonsky, 2022). Secara umum, *Centrism* mewakili keseimbangan antara politik kiri dan kanan.

Maka dari itu dalam dinamikanya, politik sentris akan memberikan kecenderungan yang berbeda-beda sesuai dengan isu kebijakan yang sedang diperdebatkan, tak terkecuali kebijakan luar negeri UE. Hal ini kemudian mendorong peneliti dalam menguji pengaruh ideologi dan identitas di PE dan memilih kelompok politik sentris sebagai objek kajian penelitian. Hal ini didasari pada fakta bahwa aliran politik sentris *third way* dan politik sentris dengan preferensi kanan-kiri tetap menjadi ideologi yang paling dominan dalam PE sehingga sejauh mana aliran politik ini bisa menjadi *contending ideology* di tengah polarisasi posisi terjauh spektrum politik.

Dalam menganalisis pengaruh ideologi dan identitas kelompok politik sentris di PE terhadap proses pengambilan kebijakan tingkat UE, peneliti lalu menggunakan variabel ekstra yakni kebijakan spesifik yang juga diperdebatkan di PE. Peneliti secara khusus memilih isu spesifik yang juga dibahas dalam skema CFSP yakni strategi UE di Indo-Pasifik. Secara strategis kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi semakin penting bagi UE. Pertumbuhan ekonomi, demografi, dan bobot politik di kawasan ini menjadikan Indo-Pasifik sebagai pemain kunci dalam mengatasi tantangan global. Dalam konferensi pers *Joint Communication on the Indo-Pacific* Komisi Eropa, *Vice President/High Representative* Josep Borell mengatakan bahwa Indo-Pasifik adalah bagian dunia yang sangat penting bagi UE, Indo-Pasifik juga merupakan masa depan di mana pusat gravitasi dunia bergerak baik secara geo-ekonomi maupun geopolitik (European Union External Action Service, 2021). Strategi UE di Indo-Pasifik adalah undangan kepada mitra UE di kawasan untuk bersama-sama mengatasi tantangan bersama dan menegakkan hukum internasional serta mempertahankan nilai dan prinsip yang menjadi komitmen bersama.

Prioritas utama UE dalam meningkatkan perannya di kawasan Indo-Pasifik dipaparkan melalui 7 area prioritas (European External Action Services, 2022) yakni, *Sustainable and inclusive prosperity; Green transition; Ocean governance; Digital governance and partnerships; Connectivity; Security and defence; dan Human security*. Keterlibatan UE yang meningkat di Indo-Pasifik bertujuan untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka untuk semua sambil membangun kemitraan yang kuat dan langgeng. Pesan dasarnya adalah bahwa UE akan memperdalam keterlibatannya dengan mitra di Indo-Pasifik untuk menanggapi dinamika yang muncul yang memengaruhi stabilitas regional. Pendekatan UE dirancang untuk mendorong tatanan internasional berbasis aturan, lapangan bermain yang setara, serta lingkungan yang terbuka dan adil untuk perdagangan dan investasi, mengatasi perubahan iklim dan mendukung konektivitas dengan UE.

Melalui penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan secara sementara bahwa strategi UE di Indo-Pasifik merupakan salah satu kebijakan vital demi melancarkan

kepentingan dan peran UE di kawasan. Dalam melancarkan strategi tersebut kemudian yang paling penting adalah bagaimana badan internal UE dapat bersinergi untuk menyukseskan kepentingan UE di Indo-Pasifik. Namun masalah yang kemudian muncul adalah disintegrasi dan perdebatan di dalam badan UE sendiri yang sulit dicapai. Salah satunya di dalam badan PE, mengingat keputusan akhir PE didasarkan atas basis voting MEPs yang juga memiliki kepentingannya sendiri. Kepentingan ini kemudian tidak lain kepentingan kelompok politik yang memiliki ideologi dan identitasnya masing-masing terkait prioritas kebijakan yang perlu dilakukan UE. Oleh karena itu, peneliti memahami bahwa suatu alasan yang penting untuk mempertimbangkan kontestasi ideologi dan identitas di EP dalam menyetujui pengembangan kebijakan di tingkat UE.

Pertimbangan ini kemudian diikuti dengan temuan peneliti atas setidaknya dua belas penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh PE bagi kebijakan luar negeri UE maupun penelitian yang membahas kontestasi ideologi dan identitas politik, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan di PE. Beberapa penelitian ini kemudian menjadi dasar studi literatur yang mendukung signifikansi penelitian peneliti mengambil tema yang ditentukan.

Saat ini terdapat beberapa penelitian yang terdahulu yang sepakat bahwa PE memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri UE. Literatur tersebut menyepakati bahwa selama beberapa dekade terakhir wewenang atas anggaran, legislasi, dan pengawasan telah meluas secara signifikan dalam proses pengambilan kebijakan UE, termasuk promosi terhadap isu-isu internasional. Dalam sebuah buku yang berjudul *“The European Union’s New Foreign Policy”*, Myriam Goinard dalam buku yang diedit Martin Westlake (2020) secara spesifik dalam bab yang berjudul *“The Growing Role of the European Parliament as an EU Foreign Policy Actor”* membahas bagaimana PE saat ini tengah mempertahankan hak otonomi kelembagaan dan mencoba mempromosikan kebutuhan atas pendekatan kebijakan luar negeri UE yang lebih ramah terhadap keterlibatan parlemen. Hal ini telah dilakukan PE melalui wewenang *co-legislator* di bidang yang secara spesifik membahas isu hubungan luar negeri seperti perdagangan, kerja sama dengan negara ketiga, hingga bantuan kemanusiaan.

Kekuatan ini termasuk juga pada wewenang anggaran, legislasi, dan pengawasan parlemen yang secara formal mengatur proses pembentukan kebijakan luar negeri UE. Kesimpulan ini kemudian ditemukan pada penelitian lainnya yang membahas peran PE dalam proses pembentukan EEAS (Raube, 2012).

Raube dalam studinya yang berjudul “*The European External Action Services and European Parliament*” menemukan adanya proses *parliamentarization* dalam pembentukan EEAS. EEAS yang kemudian menjadi badan resmi layanan diplomatik UE memberikan momentum yang tidak kalah penting bagi PE dalam meningkatkan perannya dalam hubungan luar negeri UE. Melalui keterlibatan prosedural, PE mampu menjadi *co-negotiator* dalam pembentukan EEAS dan memungkinkan pengawasan parlemen yang lebih jauh terhadap kelembagaan dan diplomasi UE. Fenomena *parliamentarization* yang terjadi juga kemudian mengungkapkan bahwa ada peran formal dan informal yang dimiliki PE dalam memengaruhi kebijakan luar negeri UE.

Pernyataan bahwa PE memiliki peran yang besar dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat UE diperkuat oleh artikel jurnal selanjutnya yang berjudul “*Global Europe? The new EU External Action Instrument and the European Parliament*”. Dalam penelitian ini (Burni et al., 2021) setuju bahwa PE memiliki sumbangsih besar lagi-lagi melalui wewenang co-legislator untuk memperkenalkan perubahan pada dua peran kebijakan pembangunan UE yaitu kontrol dan pengawasan anggaran. Dalam proses negosiasi kebijakan *Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instruments* (NDICI – Global Europe) PE menunjukkan sikap asertif dalam mengejar kepentingannya yang diartikulasikan melalui prioritas kebijakan. PE telah berhasil mempromosikan beberapa preferensinya dalam negosiasi NDICI dengan efek meningkatkan agensinya sendiri dalam tata kelola tindakan eksternal UE.

Literatur selanjutnya kemudian sama-sama sepakat bahwa PE memiliki pengaruh yang signifikan, namun peneliti menemukan adanya keunikan yang menjembatani literatur yang telah dipaparkan di atas. Kleizen (2016) dalam artikelnya yang berjudul “*Mapping The Involvement of The European Parliament in EU External Relations – A Legal and Empirical Analysis*” menemukan ada dua

tingkatan pengaruh PE yang berada secara *de jure* dan praktis. Secara *de jure*, Pasal 218 (6) *Treaty of The Function of European Union* (TFEU) memberikan PE alat veto yang sangat kuat dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Pasal 218 TFEU kemudian membingkai siklus hidup perjanjian internasional dan menjadi hukum positif yang perlu diikuti lembaga-lembaga UE. Selain itu, Kleizen juga menemukan temuan bahwa negara-negara anggota UE sendiri sungkan dalam memasukkan terlalu banyak elemen supranasional di bidang yang sangat sensitif seperti kebijakan luar negeri dan keamanan. Hal ini kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri di Eropa meskipun memiliki kerangka seperti CFSP, masalah kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri masih secara eksklusif menjadi urusan dapur masing-masing negara anggota.

Sedikit berbeda dengan penelitian Kleizen, penelitian Lazarou (2019) dalam "*The European Parliament in Security and Defence: The Parliamentary Contribution to the European Defence Union*" menemukan bahwa realitas geopolitik dunia telah mendorong PE untuk memiliki peran yang lebih besar dalam menyetir kebijakan keamanan dan pertahanan UE. Melalui *European Defence Union* (EDU) PE mewujudkan prioritas kepentingan parlemen melalui resolusi dan opini yang disampaikan dalam sidang pleno. Seiring dengan berkembangnya kebijakan pertahanan UE yang didasarkan pada *co-decision* atau keputusan bersama, PE menjadi poros penentu untuk kebijakan keamanan dan pertahanan seperti *The European Defence Industrial Development Programme* (EDIDP). Penelitian ini kemudian meyakinkan peneliti bahwa kebijakan yang bersifat *high politics* di PE memiliki signifikansi yang cukup besar terutama kebijakan keamanan.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji kebijakan strategi UE di Indo-Pasifik di mana kebijakan di dalamnya merangkap kebijakan keamanan Indo-Pasifik. Maka dapat disimpulkan secara sementara bahwa PE tentunya memiliki andil yang cukup besar dalam proses pengambilan kebijakan di Indo-Pasifik sebagai kawasan yang penting bagi UE.

Diskursus mengenai perkembangan peran PE pasca Perjanjian Lisboa ditinjau lebih jauh melalui artikel "*The European Parliament in View of the Development of the EU Security and Defence Policy After The Lisbon Treaty*"

(Staszczyk, 2018). Staszczyk melihat bahwa pasca Perjanjian Lisboa, peran PE memiliki landasan hukum yang cukup besar dalam proses pembentukan kebijakan keamanan dan pertahanan UE meskipun dalam segi implementasi tidak sebesar ekspektasi yang seharusnya tertulis secara hukum.

Saat menilai kunci posisi PE pada masalah CSDP, perlu dicatat bahwa, dari sudut pandang formal dan perjanjian, PE bukanlah pembuat keputusan bersama sepenuhnya. Hal ini berarti bahwa dalam kaitannya dengan isu CSDP, peran PE bermuara pada peran utama sebagai lembaga penasehat dan konsultatif. Keputusan non-legislatif yang diambil oleh PE di bidang CSDP merupakan instrumen utama untuk menyampaikan pendapat PE di bidang CSDP. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum, keputusan non-legislatif ini memiliki kepentingan politik yang besar.

Penelitian-penelitian tersebut cukup memberikan rasionalisasi kepada peneliti bahwa PE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri UE. Tetapi penelitian tersebut baru menjelaskan peran PE secara umum terhadap kebijakan luar negeri UE. Penelitian-penelitian tersebut juga belum secara spesifik membahas aktor maupun *elite* yang menjadi penggerak di badan PE. Oleh karena penelitian-penelitian tersebut masih menjelaskan peran PE secara makro, sehingga belum berbicara mengenai hipotesis peneliti terhadap aktor yang berada di dalam PE yakni kelompok politik.

Analisis yang lebih mikro dalam badan PE dalam literatur yang merupakan buku berjudul *“European Parliament’s Political Groups in Turbulent Times”* (Ahrens, Elomäki, et al., 2022) karya Johanna Kantola, Anna Elomaki, dan Petra Ahrens. Buku ini dapat dikatakan sebagai sebuah pengantar dalam studi kelompok politik sebagai aktor kunci di PE. Dalam animo buku ini, Ahrens et.al. menyatakan bagaimana peningkatan wewenang PE memberikan kekuasaan yang lebih besar lagi bagi kelompok politiknya. Sehingga proses pengambilan keputusan maupun perilaku kelompok politik di parlemen perlu dicermati dan dianalisis lebih jauh lagi.

Dalam memahami sejauh mana suatu kelompok politik berpengaruh, beberapa karakteristik menjadi tolak ukur yang penting. Pertama, variasi ukuran

dan besarnya suatu kelompok politik berdampak pada kekuatan relatif antar kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Semakin besar kelompok maka semakin besar pula mereka dapat memengaruhi presiden, wakil presiden, dan ketua komite di parlemen. Pernyataan ini kemudian mendukung hipotesis peneliti terkait besarnya suatu kelompok di Parlemen dapat memengaruhi *policy output* yang diputuskan. Kedua, afinitas atau ideologi politik yang dimiliki tiap-tiap kelompok. Ideologi politik dan kontestasi ideologi penting secara internal untuk menentukan posisi dan identitas kebijakan suatu kelompok politik. Ketiga, kohesi suara dalam suatu kelompok politik dalam proses voting dalam kelompok politik kekompakan suatu kelompok politik dalam mempromosikan identitas politik masing-masing. Melalui beberapa penelitian tersebut dapat disepakati bahwa PE dan kelompok politik di dalamnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri UE.

PE merupakan suatu lembaga legislatif supranasional yang komposisi di dalamnya terdiri atas anggota parlemen yang terdiri atas kelompok politik yang tergabung atas *Europarty*. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan kontestasi kepentingan dan komposisi ideologi di dalam PE. Dalam "*How Does the Composition of The European Parliament Shape its Role in EU Decision Making*" (Costello, 2022) menyatakan bahwa jika PE responsif terhadap hasil Pemilu Eropa, maka posisi yang diambil selama negosiasi tentang isu kebijakan dengan lembaga UE lainnya akan mencerminkan komposisi ideologisnya. Penelitian ini menganalisis komposisi ideologi PE dari tahun 1999 hingga 2019 dan membandingkannya dengan posisi yang diambil oleh negosiasi legislatif PE dengan pemberian negara anggota selama periode yang sama.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa posisi yang diambil oleh PE lebih sejalan dengan profil ideologis dari "koalisi besar" antara tiga kelompok partai utama yakni EPP, S&D, ALDE (*Renew Europe*) daripada posisi median MEP di parlemen secara keseluruhan. Temuan penelitian ini kemudian mendukung bagaimana ketiga kelompok politik terbesar di PE yang didominasi oleh ideologi sentris memberikan pengaruh terhadap posisi PE dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan UE. Dari realitas ini dapat disimpulkan juga

kemudian bahwa tiga kelompok politik terbesar beserta ideologi dan identitasnya masing-masing di PE memiliki peran yang besar dalam proses pengambilan kebijakan.

Mengenai pengaruh atas pertarungan ideologi dan identitas masing-masing kelompok politik berperan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri tersebut dibahas dalam literatur selanjutnya (Raunio & Wagner, 2020) dalam *“Party Politics or (Supra-)National Interest? External Relations Votes in the European Parliament”*. Proses pengambilan kebijakan luar negeri dan keamanan di EP sering kali merupakan demonstrasi patriotisme dan persatuan Eropa yang seharusnya bersih dari kontestasi kepentingan kelompok politik. Raunio dan Wagner kemudian mematahkan tesis ini dengan menemukan temuan bahwa pertarungan ideologi antar kelompok politik dan MEPs masih sangat kental dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri UE. MEPs tidak berkumpul di bawah bendera UE dan juga tidak berkumpul di bawah blok nasional dalam proses voting kebijakan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, perdagangan, keamanan, dan bantuan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa PE secara alamiah sangat sarat atas pertarungan politik kepentingan bahkan dalam menentukan arah hubungan luar negeri UE.

Penelitian selanjutnya kemudian mendukung setuju dengan Raunio dan Wagner di mana ideologi partai politik di PE berperan penting dalam menentukan posisi kebijakan luar negeri. Dalam *“Party Ideologies and European Foreign Policy. Examining the Transnational Foreign Policy Space”*, Otjes (2022) dkk menyatakan bagaimana dimensi kiri dan kanan masih menjelaskan sebagian besar pola pemungutan suara. Heterogenitas preferensi atas kebijakan luar negeri di PE kemudian menjadi penghambat integrasi dan kemajuan hubungan eksternal UE. Dalam hal kebijakan luar negeri, PE tampaknya merupakan ruang ideologis transnasional, bukan ruang internasional. Dalam EP, kebijakan luar negeri Eropa diperebutkan atas dasar ideologis, sehingga posisi suatu partai adalah prediktor yang baik untuk menentukan kepentingan partai dalam menanggapi berbagai isu kebijakan luar negeri mulai dari hak asasi manusia hingga perjanjian internasional.

Peneliti dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana posisi politik sentris dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri UE. Sehingga penting untuk mengetahui posisi kelompok politik sentris yang saat ini mendominasi PE tidak lain adalah EPP, S&D, dan *Renew Europe*. Otjes dkk telah memperlihatkan bahwa prinsip yang dimiliki suatu partai politik mencerminkan bagaimana mereka akan berperilaku untuk menanggapi suatu isu kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini kebijakan tersebut tidak lain adalah kebijakan UE di Indo-Pasifik.

Masih berbicara tentang peran kelompok politik di PE terhadap kebijakan luar negeri UE, (Fiott, 2015) dalam artikelnya yang berjudul “*The Diplomatic Role of the European Parliament’s Parliamentary Groups*” menjawab peran kelompok politik dalam PE memerankan peran diplomatiknya melalui kebijakan luar negeri UE. Fiott menyatakan bahwa kelompok politik di PE menggunakan mekanisme legislatif untuk memengaruhi CFSP melalui partisipasi kegiatan diplomatik di negara ketiga. Kegiatan diplomatik ini kemudian tidak lain adalah kunjungan delegasi dan pertemuan antar parlemen. Salah satu poin menarik dari penelitian ini adalah bagaimana Fiott melihat bahwa kepentingan yang dimiliki oleh kelompok politik sejatinya digerakkan secara ideologis bisa menjadi kekuatan mereka untuk menjadi aktor HI. Hal ini kemudian menyimpulkan bahwa kepentingan ideologi yang dimiliki oleh kelompok politik berperan penting untuk menentukan tujuan kebijakan luar negeri di PE.

Selain kontestasi ideologi, pengaruh kepentingan dan identitas kemudian dinyatakan oleh literatur selanjutnya oleh (Hyde-Price, 2018). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Interests, Institution and Identities in the Study of European Foreign Policy*” Hyde menemukan bahwa dalam kasus UE, kebijakan luar negeri dan keamanannya bertumpu pada 'identitas' bersama Eropa yang telah berkembang secara bertahap selama beberapa dekade terakhir. Rasa identitas Eropa yang muncul ini penting dalam mendefinisikan peran Eropa dalam masyarakat internasional, teman-temannya, musuh-musuhnya, serta kepentingan dan preferensi bersama.

Tema yang selama ini terus dibahas dalam studi HI adalah keterbatasan pendekatan konstruktivis yang dominan dalam analisis kebijakan luar negeri untuk mempertimbangkan faktor ideasional yang menentukan CFSP Eropa. Sehingga

dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan yang lebih memperhatikan faktor ideasional dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, terutama kebijakan UE di Indo-Pasifik melalui peran PE yang didominasi oleh kelompok politik sentris.

Melalui rasionalisasi studi yang telah dilakukan sebelumnya terlihat bahwa diskursus pertarungan kelompok politik yang ada di PE dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri UE sangat penting dan menarik untuk dikaji. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya *research gap* di mana belum ada penelitian yang secara *detail* membahas pengaruh dari ideologi dan identitas yang dimiliki suatu kelompok politik dan pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat UE. Mengingat aktor utama di PE juga terkumpul atas kesamaan pandangan politik, ideologi dan identitas kelompok politik tentunya menjadi faktor yang penting untuk diteliti.

Selain itu kelompok politik yang bergerak atas dasar afinitasnya masing-masing juga memberikan kemungkinan bahwa spektrum politik masing-masing kelompok politik memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hubungan luar negeri. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menggali sudut pandang melalui studi kasus yang belum pernah dibahas sebelumnya. Bagaimana kelompok politik berideologi sentrisme di PE dengan identitas kanan, kiri, dan *third way* memandang kawasan Indo-Pasifik dalam hubungan eksternal UE akan menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Hal ini kemudian menjadi tujuan peneliti untuk menguji hipotesis yang sebelumnya sudah ditentukan dengan harapan memperkaya diskursus studi *elite* individu kelompok politik beserta ideologi dan identitas sentrisme yang dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan strategi UE di Indo-Pasifik.

I.2 Rumusan Masalah

Melalui berbagai inisiatif UE telah mengembangkan kehadiran dan peran yang kuat di panggung internasional. Kehadiran ini terkadang diperkuat, tetapi terkadang juga ditentang oleh badan UE sendiri. Kehadiran sejumlah lembaga supranasional UE yang kuat, terkadang menyebabkan ketegangan dan perdebatan.

Salah satu badan supranasional yang berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan UE adalah PE. Aktivitas PE yang secara resmi direpresentasikan melalui kelompok politik yang terbagi atas ideologinya masing-masing menjadi salah satu sebab konsensus sulit dicapai. Tidak terkecuali usaha pengembangan kebijakan eksternal UE di kawasan Indo-Pasifik. Kelompok politik tentunya dengan ideologinya masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait prioritas apa yang perlu diusung oleh UE.

Lebih lanjut, PE yang saat ini didominasi oleh kelompok politik berideologi sentris secara tidak langsung memberikan pengaruh identitas terhadap kebijakan UE melalui PE. Mengingat politik sentris saat ini mendominasi hampir setengah dari suara voting di PE, sehingga keberadaan politik sentris kontemporer menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dicermati. Maka dari itu, dalam rangka memahami ideologi dan identitas kelompok politik sentris dalam memberikan pengaruhnya terhadap proses pembangunan kebijakan UE di kawasan Indo-Pasifik di PE, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut yakni:

“Bagaimana ideologi dan identitas kelompok politik sentris di Parlemen Eropa membentuk kebijakan strategi UE di Indo-Pasifik?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang juga rumusan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh ideologi dan kompas politik dalam proses pengambilan kebijakan di PE terhadap strategi UE di Indo-Pasifik. Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan yakni atas tujuan teoritis dan tujuan praktis:

- A. *Tujuan Teoritis*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami teori konstruktivisme, teori identitas, dan teori ideologi politik melalui aktivitas kelompok politik sentris di PE dalam proses pengambilan kebijakan strategi UE di *Indo-Pacific*.
- B. *Tujuan Praktis*. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengkaji aspek ideologi dan identitas kepemimpinan di UE pada proses pengambilan kebijakan.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, peneliti menentukan beberapa manfaat utama yang dapat diberikan melalui daya guna akademis dan daya guna praktis. Dari segi daya guna akademis, peneliti berharap penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan diskursus ideologi dan identitas dalam studi ilmu hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ideologi dan identitas melalui teori-teori kebijakan luar negeri. Peneliti yakin bahwa penelitian berbasis ideologi dapat menjelaskan perilaku aktor hubungan internasional secara mendalam melalui studi preferensi dan identitas.

Dari segi daya guna praktis, peneliti juga menentukan bahwa penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam mempertimbangkan ideologi dan identitas yang dimiliki aktor hubungan internasional dan juga memberikan proyeksi hubungan UE dan negara-negara Indo-Pasifik di masa mendatang jika terjadinya pergeseran kepemimpinan di badan UE.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah menyiapkan sistematika penulisan penelitian yang terdiri atas enam bab. Sistematika penulisan di antaranya:

A. Bab 1 Pendahuluan

Melalui bab 1 peneliti menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dari penulisan penelitian

B. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Melalui bab 2, peneliti menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan dalam sebagai acuan gagasan penelitian peneliti. Kerangka konseptual terdiri atas konsep-konsep konstruktivisme, identitas, dan ideologi politik. Selain itu peneliti juga akan memberikan kerangka pemikiran berupa alur yang merepresentasikan arah pemikiran penelitian yang digagas.

C. Bab 3 Metode Penelitian

Melalui bab 3, peneliti akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Hal ini termasuk objek penelitian, jenis

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data hingga proses analisis data.

D. Bab 4 Ideologi dan Identitas Kelompok Politik Sentris di Parlemen Eropa

Melalui bab 4, peneliti akan memberikan pemahaman terkait kontestasi ideologi dan identitas kelompok politik sentris di PE. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana ideologi dan identitas kelompok politik sentris dapat mendominasi PE.

E. Bab 5 Kebijakan Politik Sentris di Parlemen Eropa Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Strategi UE di Indo-Pacific

Melalui bab 5, peneliti akan menjelaskan bagaimana ideologi dan pandangan politik yang direpresentasikan oleh kelompok politik *European People Party's, Socialist & Democrats, dan Renew Europe* sebagai aliran sentris yang mendominasi aktivitas PE terhadap kebijakan Strategi UE di Indo-Pacific.

F. Bab 6 Penutup

Melalui bab 6, peneliti akan menyimpulkan penelitian dan juga akan merangkum hasil temuan penelitian dalam rangka memenuhi tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga akan memberikan saran yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembang penelitian selanjutnya.